



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

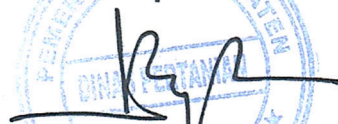
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian sebagai suatu sumber informasi dan evaluasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan Data sumber yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini merupakan hasil implementasi rencana kerja dan kegiatan yang dibuat dalam Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dana untuk pelaksanaan Tahun 2024 yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026.

Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada format standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diuraikan secara ringkas Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang kemudian dilanjutkan dengan laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan dalam bentuk Pengukuran Keberhasilan Kinerja, Pencapaian dan Analisis Kinerja serta Analisis Capaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Poso. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Poso.

Poso, Januari 2025

**Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Poso**



MUSTAFA A. TOHAN, SP., MP
NIP. 19720207 200701 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kab. Poso.....	5
1.4 Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Poso	16
1.4.1 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Penjurusan Struktural .	17
1.4.2 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	17
1.4.3 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis Dinas Pertanian 2021 – 2026	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Kriteria Pengukuran Keberhasilan	24
3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2024	25
3.2.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	44
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026	20
Tabel 2.	Indikator Kinerja dan Target 2021 – 2026	20
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2023	23
Tabel 4.	Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kab. Poso Tahun 2023.....	25
Tabel 5.	Data PDB/PDRB Nasional, Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso Tahun 2024	26
Tabel 6.	Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Tanaman Pangan	29
Tabel 7.	Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Tanaman Hortikultura	31
Tabel 8.	Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Tanaman Perkebunan	34
Tabel 9.	Target dan Realisasi Kinerja Populasi Peternakan	37
Tabel 10.	Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Peternakan.....	38
Tabel 11.	Target dan Realisasi Kinerja Pengelolaan Lahan Air dan Alsintan.....	40
Tabel 12.	Target dan Realisasi Kinerja Kenaikan Kelas Kelompok Tani	41
Tabel 13.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Poso	42
Tabel 14.	Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani.....	43
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kab. Poso Tahun 2023	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kualifikasi Pegawai berdasarkan Penjurangan Struktural	17
Gambar 2.	Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	17
Gambar 3.	Kualifikasi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang	18
Gambar 4.	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan 2022-2023.....	28
Gambar 5.	Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan 2023	28
Gambar 6.	Produktivitas Tanaman Tanaman Padi 2021-2023	30
Gambar 7.	Produktivitas Tanaman Tanaman Jagung 2021-2023	30
Gambar 8.	Produksi Tanaman Hortikultura	31
Gambar 9.	Produksi Tanaman Perkebunan	33
Gambar 10.	Produktivitas Tanaman Perkebunan	33
Gambar 11.	Perkembangan Populasi Ternak	36
Gambar 12.	Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Poso.....	54
Lampiran 2.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh

pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya.

Pembangunan pertanian Kabupaten Poso dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, Kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pembangunan pertanian turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Kinerja program pembangunan pertanian di Kabupaten Poso dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 sasaran pembangunan pertanian meliputi : (1) Meningkatnya produksi dan luas tanam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sektor peternakan (2) Meningkatnya kesejahteraan petani dan (3). Meningkatnya tata Kelola dinas pertanian yang baik dan akuntabel. Amanah sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindak lanjuti Dinas Pertanian

Kabupaten Poso dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026. Strategi pembangunan pertanian selama periode 2021 – 2026 akan dititikberatkan pada 2 (dua) strategi utama pembangunan pertanian Kabupaten Poso yaitu : (1) Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan indikator kontribusi sektor pertanian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan (2) Meningkatnya Kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Poso tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan dan sekaligus isu strategis yang dihadapi pembangunan pertanian di Kabupaten Poso antara lain : (1) Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Poso masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim dengan analisis sebagai berikut: **Curah Hujan yang Tidak Stabil:** Padi sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Jika curah hujan berlebihan, lahan sawah dapat tergenang, menyebabkan banjir yang merusak tanaman dan menurunkan hasil panen. Sebaliknya, kekurangan hujan atau distribusi hujan yang tidak merata dapat menyebabkan kekeringan, sehingga tanaman mengalami stres air yang menghambat pertumbuhan dan proses penyerbukan. **Perubahan Suhu dan Kelembaban:** Peningkatan suhu yang tidak sesuai dengan kisaran optimum padi dapat mempercepat laju evapotranspirasi, mengurangi ketersediaan air di tanah, serta mengganggu proses fotosintesis. Selain itu, fluktuasi kelembaban udara yang ekstrem juga dapat memicu serangan hama dan penyakit, yang berpotensi merusak tanaman. Contoh kasus saat terjadinya El Nino di Kabupaten Poso pada tahun

2023 masih sangat mempengaruhi akan produksi dan areal tanam, efek dari El Nino tersebut antara lain terjadinya kebakaran hutan, kekeringan parah, defisit air permukaan dan penyimpanan air di waduk, danau dan Sungai.

(2) Kerusakan Infrastruktur (Misalnya, Bendungan): **Gangguan Distribusi Air** : Bendungan dan sistem irigasi merupakan tulang punggung pasokan air bagi sawah padi. Kerusakan pada bendungan—misalnya karena bencana alam atau kegagalan struktur—dapat menyebabkan pasokan air irigasi menjadi tidak stabil. Air yang tidak mencukupi pada musim kemarau mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan, sedangkan kegagalan bendungan secara tiba-tiba dapat menyebabkan banjir yang merusak tanaman. **Dampak Jangka Panjang** : Kerusakan infrastruktur juga dapat mengurangi efisiensi sistem irigasi secara keseluruhan, sehingga dalam jangka panjang produksi padi menurun karena tanaman tidak mendapatkan pasokan air yang optimal secara konsisten. Contoh kasus saat bendungan di kecamatan poso pesisir utara rusak pada tahun 2022-2023 hingga sekitar 400 Ha lahan sawah produktif terbengkalai hingga petani alih fungsi komoditi ke jagung dan kedelai. (3) Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam; (4) Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani; (5) Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis; (6) Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk

pertanian; (7) Pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar regional dan internasional.

Dinas Pertanian Kabupaten Poso di tahun 2024 telah menerapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan maupun target yang ingin dicapai yaitu : (1) Tingkat produktivitas tanaman pangan : Padi sawah, Jagung; (2) Tingkat produktivitas tanaman hortikultura : Bawang merah, Cabe (3) Tingkat Produktivitas Perkebunan: Kakao, Kopi Arabika, Kopi Robusta; (4) Tingkat Produktivitas peternakan : Sapi, Kerbau, Babi, kambing; (5) Populasi ternak : Sapi, Kerbau, kambing, babi; (6) Presentase jumlah sarana produksi tanaman (alat pengolahan dan alat pasca panen); (7) Persentase penurunan penyakit hewan menular yang ditangani; (8) Persentase PAD sektor peternakan; (9) Persentase tingkat penerapan teknologi pertanian; (10) Kelas Kemampuan Petani : Pemula, Lanjut, Madya; (11) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ; (12) Persentase PAD sektor pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Poso terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris dan 6 (enam) Bidang (Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Poso dapat dilihat pada Lampiran 1.) Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pertanian Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan pada bidang prasarana dan sarana, bidang

- tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas pada bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso

Dinas Pertanian Kabupaten Poso merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun uraian Tupoksi dari masing-masing unit kerja sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Produksi dan Perlindungan

Tanaman Perkebunan, Bidang Peternakan dan Penyuluhan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan uraian pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan asset, pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas
2. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan asset dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset, dan pengelolaan umum dan kepegawaian
 - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan asset, umum, kepegawaian dan rumah tangga
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan dan asset, umum, kepegawaian, dan rumah tangga
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, umum dan kepegawaian dan rumah tangga
 - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi :

1. Analis Perencanaan Program
2. Analis keuangan dan asset
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Prasarana dan Sarana

1. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana
2. Bidang ini mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi
 - c. Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi
 - d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian
 - e. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian
 - f. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi
 - g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan

dan investasi

- h. Penyiapan bahan dan data serta penyusunan dan penyampaian bahan laporan pelaksanaan tugas urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :

1. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda
2. Analis Teknik Pengairan Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Muda

Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyusun kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan

Hortikultura;

- d. Penyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana pertanian dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- i. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis ibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

1. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
3. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya

Bidang Perkebunan

1. Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibidang perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
 - d. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - f. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - g. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, pananggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - i. Penanggulangan dangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

- j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- l. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- m. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perkebunan membawahi :

- 1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- 2. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
- 3. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

Bidang Peternakan

- 1. Bidang peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha

- peternakan, pakan dan prasarana dan sarana;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana;
 - d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Peternakan;
 - e. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas di bidang peternakan;
 - f. Pengendalian dalam penyelenggaraan program di bidang peternakan;
 - g. Pengelolaan sumberdaya genetik hewan/ternak;
 - h. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
 - i. Pengendalian kebijakan pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
 - j. Pengendalian distribusi dan penggunaan prasarana dan sarana peternakan;
 - k. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana; dan
 - l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Peternakan membawahi :

1. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
2. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda

3. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda

Bidang Kesehatan Hewan

1. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kesehatan Hewan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pencegahan pemberantasan penyakit, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk perikanan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan pencegahan pemberantasan penyakit, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk peternakan;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan , pakan dan prasarana dan sarana;
 - d. Penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan;
 - f. Pembinaan teknis atapy penyelenggaraan tugas dibidang kesehatan hewan;
 - g. Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan program kerja di bidang kesehatan hewan;
 - h. Pengemgdalian dalam penyelenggaraan program di bidang kesehatan hewan;
 - i. Pengendalian penyakit hewan dan jaminan kesehatan hewan;

- j. Pengawasan peredaran obat/ vaksin hewan;
- k. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- l. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner;
- m. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- n. Pemberian bimbingan pascapanen, pengelolaan dan pemasaran produk peternakan;
- o. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pencegahan pemberantasan penyakit, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk peternakan; dan
- p. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan pencegahan pemberantasan penyakit, pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk peternakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kesehatan Hewan membawahi :

- 1. Paramedik Veteriner
- 2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- 3. Pengawas Bibit Ternak

Bidang Penyuluhan

1. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan kelembagaan, ketenagaan metode dan informasi;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Pengelolaan pengembangan dan ketenagaan;
 - g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
 - i. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi; dan
 - j. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyuluhan membawahi :

1. Penyuluh Pertanian Ahli Madya
2. Penyuluh Pertanian Ahli Muda
3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok Kepala Dinas Pertanian tingkat pelaksanaan teknis operasional di lapangan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pertanian sesuai bidang masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

1.4. Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Poso

Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Poso per 31 Desember 2024 sebanyak 245 orang Pegawai Negeri Sipil. Adapun kualifikasi pendidikan, penjenjangan struktural dan golongan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kualifikasi Pegawai berdasarkan Penjenjangan Struktural

Kualifikasi Pejenjangan Struktural (orang)



Gambar 1. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Penjenjangan Struktural

1.4.2 Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan (orang)



Gambar 2. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.4.3. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Kualifikasi Berdasar Golongan Ruang (orang)



Gambar 3. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pertanian 2021 – 2026

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016 – 2021. Sejalan dengan RPJMD 2021 – 2026 bidang pertanian, kedepan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Poso terutama dimisi keempat yaitu **POSO SEJAHTERA Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang Sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal.**

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso selama lima tahun (2021 - 2026). Renstra Dinas Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja di jajaran birokrasi di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Poso dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2021 - 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Tabel 1 disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Poso sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian tahun 2021 -2026.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Poso	Meningkatnya produksi dan luas tanam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Sektor Peternakan	Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kab. Poso	5,60	5,62	5,64	5,66	5,68	5,70	
		Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Sub Sektor Pertanian	39,36	39,79	40,23	40,67	41,12	41,57	
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Tanaman Pangan	98,97	99,97	99,99	100,01	100,03	100,05
			2. Hortikultura	103,54	103,69	104,26	104,64	105,23	105,53
			3. Perkebunan	86,46	87,86	89,86	95,23	98,33	100
4. Peternakan			107,02	107,09	107,76	108,26	108,86	109,26	
Meningkatnya tata kelola dinas pertanian yang baik dan akuntabel	Persentase capaian kinerja Dinas Pertanian terhadap target yang telah ditetapkan	94	95	96	97	98	98		

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 –2026

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2021 - 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 0 (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Tingkat produktivitas tanaman pangan (ton/ha) :									
		• Padi sawah	4,82	5,12	5,28	5,44	5,56	5,74	6,03	6,03
		• Jagung	5,05	5,71	6,5	6,04	6,37	6,71	7,86	7,86
2	Tingkat produktivitas tanaman hortikultura (ton/ha) :									
		• Bawang Merah	7,92	7,93	7,94	7,95	7,96	7,98	8,00	8,00
		• Cabe	3,11	3,18	3,25	3,32	3,41	3,50	3,80	3,80
		• Tomat	18,22	18,49	18,76	19,03	19,30	19,57	19,84	19,84
3	Tingkat Produktivitas Tan. Perkebunan (Ton/ha) :									
		• kakao,	0,85	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,96
		• kopi Arabika,	1,95	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,23	2,23
		• kopi Robusta	0,78	0,80	0,82	0,84	0,87	0,89	1,00	1,00

4	Tingkat produktivitas Peternakan (Kg) :								
	• Sapi,	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
	• Kerbau,	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14
	• Babi	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
	• Kambing	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
5	Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	34,6	35,00	43,00	46,00	50,00	60,00	71,00	71,00
6.	Presentase Penataan Padang Pengembalaan	0,06	0,06	0,06	0,07	0,09	0,11	0,14	0,14
7	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	46,67	41,67	36,67	31,67	26,67	21,67	16,67	16,67
8	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	16,67	16,67	16,67	33,34	50,00	66,67	100,00	100,00
9	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana (OPT)	0,68	0,67	0,64	0,62	0,60	0,58	0,55	0,55
10	Rekomendasi Teknis Usaha pertanian / jumlah usaha pertanian dalam arti luas								
	• Pertanian	28,00	34,00	42,00	50,00	60,00	92,00	100,00	100,00
	• Perkebunan	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	60,00	92,00	92,00
	• Peternakan	17,33	29,33	42,67	57,33	72,00	86,67	100,00	100,00
11	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	23,3	39,64	47,81	55,40	62,69	69,99	84,39	84,39

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026

Indikator sebagaimana pada tabel 2 merupakan indikator yang tertera di Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021 - 2026, dengan target sebanyak 11 Indikator. Indikator-indikator tersebut tidak semuanya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) karena bisa menjadi target kinerja program atau kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Poso untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026 yang diwujudkan dalam penetapan kinerja tahun 2024. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan Permen PAN&RB No 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja Dinas Pertanian tahun 2024 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2024 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya produksi dan luas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sektor peternakan	Tingkat produktivitas tanaman pangan	
	• Padi	5,56 ton/ha
	• Jagung	6,37 ton/ha
	Tingkat produktivitas tanaman hortikultura	
	• Bawang Merah	7,96 ton/ha
	• Cabe	3,41 ton/ha
	• Tomat	19,30 ton/ha
	Tingkat produktivitas tanaman perkebunan (Ton/ha)	
	• Kakao	0,92 ton/ha
	• Kopi Arabika	2,12 ton/ha
• Kopi Robusta	0,87 ton/ha	
Tingkat produktivitas peternakan (Kg)		
• Sapi	0,100 Kg	
• Kerbau	0,130 Kg	
• Babi	0,060 Kg	
• Kambing	0,040 Kg	
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	
	• Tanaman Pangan	100,01
	• Hortikultura	104,64
	• Perkebunan	95,23
	• Peternakan	108,26

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 –2026

Perjanjian Kinerja tersebut diterjemahkan ke dalam 6 (enam) program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2024 yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Pertanian Kabupaten Poso selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Kriteria Pengukuran Keberhasilan

Untuk mengukur capaian kinerja, Dinas Pertanian Kabupaten Poso menggunakan metode scoring, yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilaporkan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sektor peternakan	Tingkat produktivitas tanaman pangan (Ton/ha)				
	· Padi	5,56	4,57	82,10	Berhasil
	· Jagung	6,37	4,55	71,43	Cukup Berhasil
	Tingkat produktivitas tanaman hortikultura (Ton/ha)				
	· Bawang Merah	7,96	11,91	149,66	Sangat Berhasil
	· Cabe	3,41	5,94	174,19	Sangat Berhasil
	· Tomat	19,30	10,89	56,42	Kurang Berhasil
	Tingkat produktivitas tanaman Perkebunan (Ton/ha)				
	· Kakao	0,92	0,74	80,49	Berhasil
	· Kopi Arabika	2,12	1,35	63,77	Cukup Berhasil
	· Kopi Robusta	0,87	0,62	70,97	Cukup Berhasil
	Tingkat produktivitas Peternakan (Kg)				
	· Sapi	0,100	0,104	104,000	Sangat Berhasil
	· Kerbau	0,130	0,120	92,308	Berhasil
· Babi	0,060	0,059	98,333	Berhasil	
· Kambing	0,040	0,013	32,500	Kurang Berhasil	
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) *				
	· Tanaman Pangan	100,01	96,43	96,42	Berhasil
	· Hortikultura	104,64	130,49	124,70	Sangat Berhasil
	· Perkebunan	95,23	134,76	141,51	Sangat Berhasil
	· Peternakan	108,26	103,88	95,95	Berhasil

Sumber : Perjanjian Kinerja dan Hasil Pengukuran Kinerja

Ket : * Angka Sementara Data BPS Kabupaten Poso 2024

Tabel 5. Data PDB/PDRB Nasional, Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024			KETERANGAN
			POSO	SULTENG	NASIONAL	
Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Poso	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan sektor peternakan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB/PDRB)	8,40	9,75	12,61	ANGKA SEMENTARA
		Tingkat produktivitas tanaman pangan	(Ton/ha)	(Ton/ha)	(Ton/ha)	
		· Padi	4,57	4,42	5,29	
		· Jagung	4,55	4,45	5,94	
		Tingkat produktivitas tanaman hortikultura	(Ton/ha)	(Ton/ha)	(Ton/ha)	
		· Bawang Merah	6,67	5,52	10,54	
		· Cabe	5,94	6,46	7,79	
		· Tomat	10,89	6,13	18,67	
		Tingkat produktivitas tanaman Perkebunan	(Ton/ha)	(Ton/ha)	(Ton/ha)	
		· Kakao	0,74	0,48	0,45	
		· Kopi Arabika	1,35	1,80	0,99	
		· Kopi Robusta	0,62	0,89	0,76	
		Tingkat produktivitas Peternakan	(Ton/Ekor)	(Ton/Ekor)	(Ton/Ekor)	
	· Sapi	0,104	0,122	0,150		
	· Kerbau	0,120	0,135	0,177		
	· Babi	0,059	0,046	0,055		
	· Kambing	0,013	0,015	0,019		
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan tanpa perikanan		120,26	120,26	123,51	
		· Tanaman Pangan	96,43	96,43	108,90	
		· Hortikultura	130,49	130,49	118,23	
		· Perkebunan	134,76	134,76	164,30	
		· Peternakan	103,88	103,88	102,35	

Sumber : BPS RI – BPS Sulteng

3.2.1. Analisis Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2. Meningkatnya kesejahteraan petani

Sasaran Strategis 1 (SS1) MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DAN HOR AKUNTABILITAS KEUANGAN TIKULTURA

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Pasokan pangan suatu wilayah

sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan konsumsi masyarakat dalam wilayah tersebut, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (dua) komoditas pangan pokok/Utama yakni padi dan jagung.

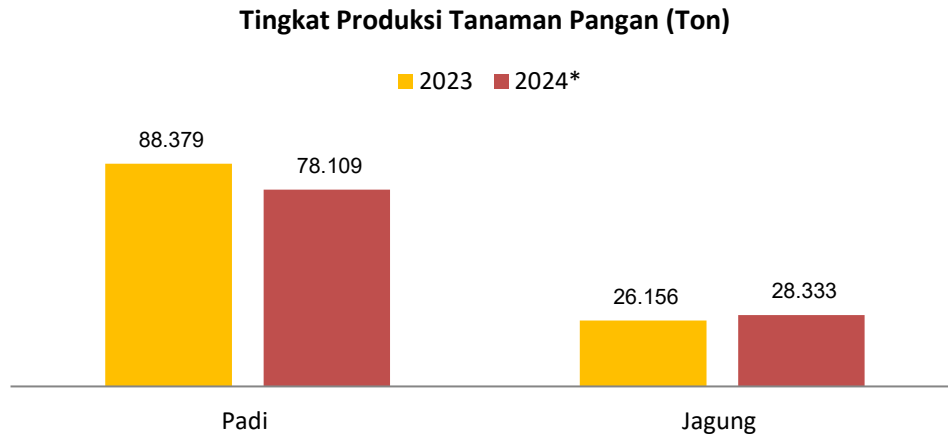
Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Poso menetapkan peningkatan produktivitas padi dan jagung sebagai indikator pencapaian sasaran strategis.

Untuk Target pencapaian produktivitas tanaman Hortikultura ada 3 (tiga) komoditi yaitu Bawang merah, Tomat dan Cabe. Untuk Tanaman Perkebunan dalam pencapaian produktivitas ada 3 (tiga) komoditi yaitu : Kakao, Kopi robusta dan kopi arabika.

Dalam upaya mencapai target peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tersebut telah dilakukan berbagai program dan kegiatan yang dianggarkan melalui dana APBD dan APBN antara lain:

- Peningkatan mutu benih;
- Bantuan benih;
- Bantuan sarana dan prasarana (pupuk, pestisida dan alsintan);
- Pengendalian OPT;
- Pengembangan infrastruktur air ;
- Aplikasi penggunaan pupuk berimbang.

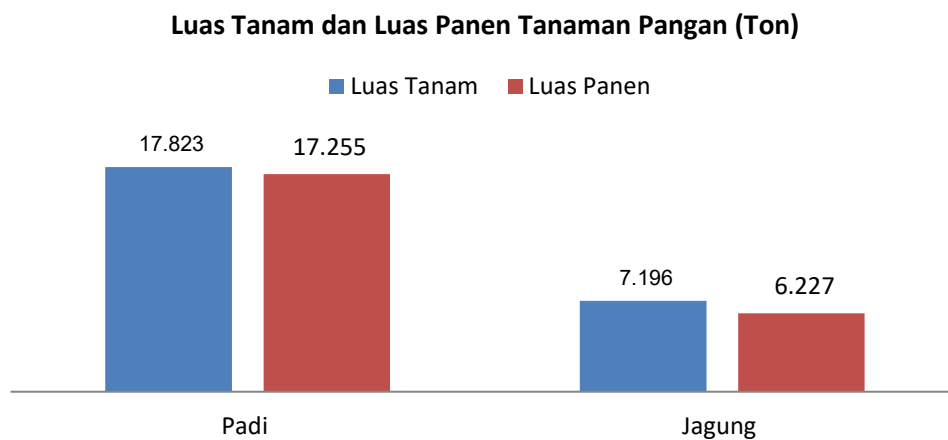
Gambaran produksi tanaman pangan utama (padi dan jagung) Kabupaten Poso disajikan pada gambar 4



** Angka Sementara*

Gambar 4. Pencapaian Produksi Tanaman Pangan Utama 2 Tahun terakhir

Gambaran Luas Tanam dan Luas Panen tanaman pangan utama (padi dan jagung) Tahun 2024 Kabupaten Poso disajikan pada gambar 5



** Angka Sementara*

Gambar 5. Pencapaian Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Utama Tahun 2024.

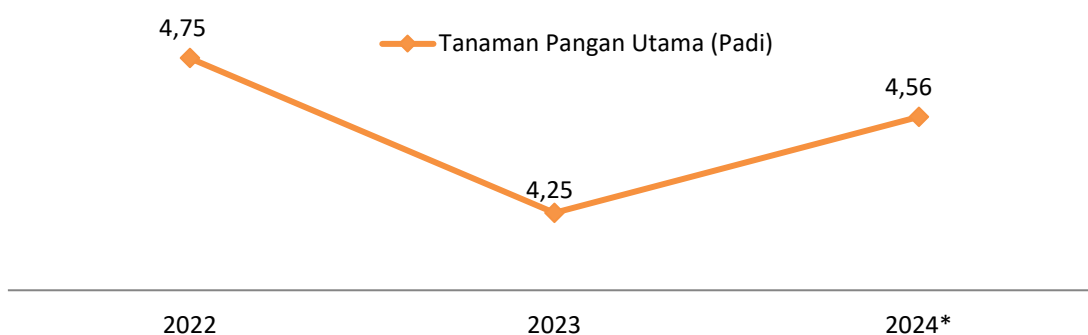
Tabel 6. Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Tanaman Pangan

	Indikator Kerja	Tingkat Produktivitas (Ton/ha)	% Capaian
Sasaran Strategis 1	Padi	Target	
		5,56	
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Jagung	Realisasi	82,10 % Berhasil
		4,57	
	Jagung	Target	
		6,37	71,43 %
		Realisasi	Cukup Berhasil
		4,55	

Data tersebut di atas menjelaskan adanya penurunan tingkat produksi tanaman pangan padi sebesar 10.270 Ton dari tahun 2023 dengan nilai 88.379 Ton ke tahun 2024 dengan nilai 78.109 Ton, namun untuk produksi Jagung meningkat sebesar 2.177 Ton dari tahun 2023 dengan nilai 26.156 ke tahun 2024 dengan nilai 28.333. Kinerja tingkat produktivitas padi sebesar 4,57 ton/ha dari target 5,56 ton/ha dengan persentase capaian kinerja sebesar 82,10% termasuk dalam kategori berhasil, demikian dengan jagung sebesar 4,55 ton/ha dari target 6,37 ton/ha dengan persentase capaian kinerja sebesar 71,43% dan ini juga termasuk dalam kategori cukup berhasil. Penurunan produksi Padi ini di akibatkan oleh rusaknya bendungan di beberapa daerah kecamatan hingga petani beralih ke tanaman jagung.

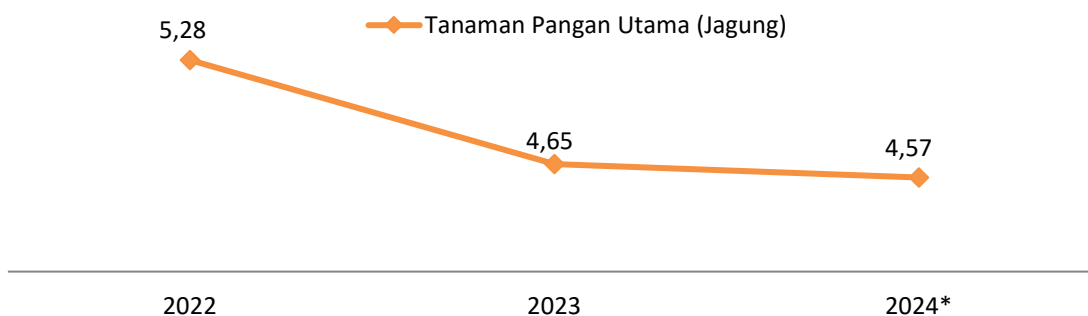
Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi dan Jagung) ton/ha 3 Tahun Terakhir disajikan pada gambar 6 dan 7 berikut :

**Produktivitas Tanaman Pangan Utama
(Padi) ton/ha 3 Tahun Terakhir**



* Angka Sementara

**Produktivitas Tanaman Pangan Utama
(Jagung) ton/ha 3 Tahun Terakhir**

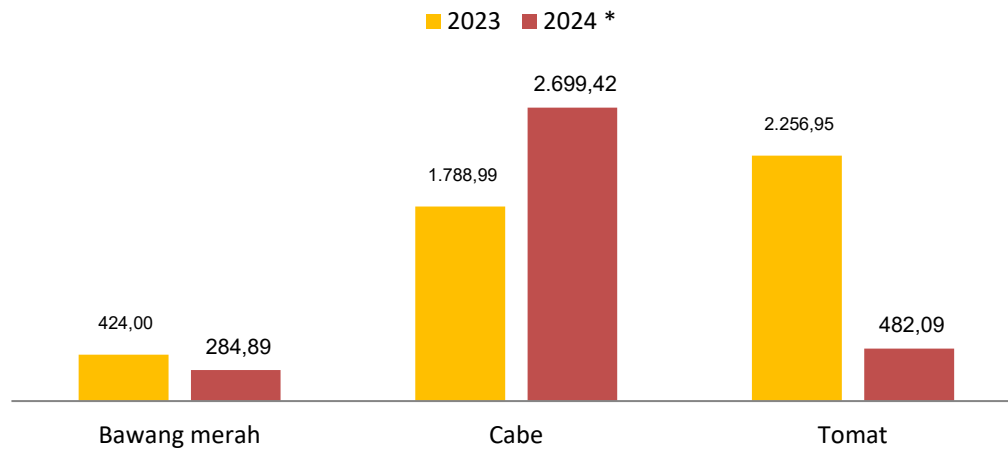


* Angka Sementara

Gambar 6 dan 7. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Padi dan Jagung 3 (tiga) tahun terakhir

Demikian juga dengan Tanaman hortikultura dapat dilihat pada Gambaran produksi tanaman Hortikultura (Bawang merah, cabe dan Tomat) Kabupaten Poso yang disajikan pada gambar 8

Tingkat Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)



Gambar 8. Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura 2 (dua) tahun terakhir

Capaian target dan realisasi kinerja indikator Produktivitas tanaman hortikultura disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Hortikultura

Sasaran Strategis 1	Indikator Kerja	Tingkat Produktivitas (Ton/ha)	% Capaian
Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura	Bawang Merah	Target	149,66% Sangat Berhasil
		Realisasi	
	Cabe	Target	174,19% Sangat Berhasil
		Realisasi	
	Tomat	Target	56,42% Kurang Berhasil
		Realisasi	

Untuk Komoditi bawang merah Tahun 2024 tingkat produktivitas sebesar 11,91 ton/ha sama dengan 149,66% capaian dari target sebesar 7,96 ton/ha, sedangkan komoditi cabe tingkat produktivitas sebesar 5,94 ton/ha dengan target 3,41 ton/ha sama dengan 174,19%

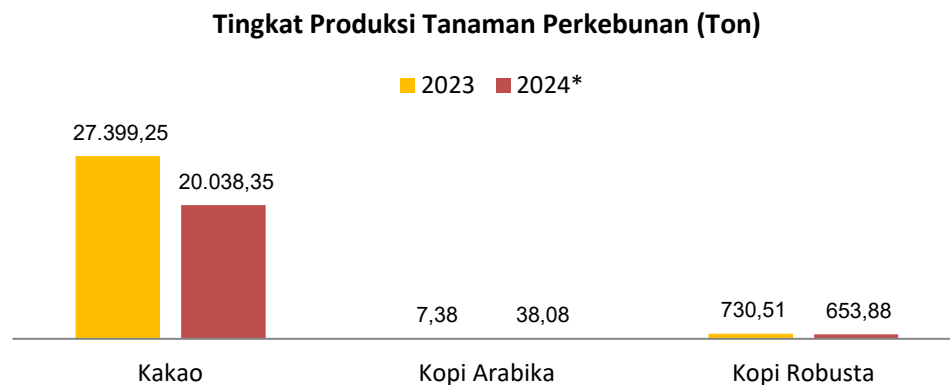
capaian, dan produktivitas tomat sebesar 10,89 ton/ha dengan target sebesar 19,30 ton/ha sama dengan 56,42% capaian terhadap target. Untuk komoditi Bawang Merah dan Cabai termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai >100% sedangkan untuk Komoditi Tomat masuk dalam kategori kurang berhasil dengan nilai <60% capaian.

Sasaran Strategis 2 (SS2) MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Pengembangan usaha perkebunan memerlukan ketersediaan lahan yang luas, tenaga kerja yang cukup, modal dan sarana prasarana yang memadai. Kabupaten Poso memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan kawasan perkebunan. Pengembangan kawasan sub sektor perkebunan di Kabupaten Poso kedepan lebih diprioritaskan pada upaya rehabilitasi dan peremajaan yang didukung dengan upaya intensifikasi untuk meningkatkan mutu produksi dan produktifitas tanaman perkebunan rakyat, disamping itu terus melakukan upaya perluasan lahan/areal terhadap komoditi – komoditi sub sektor perkebunan yang dianggap mempunyai potensi untuk dikembangkan. Potensi komoditas unggulan merupakan suatu produk yang dihasilkan atau potensial dikembangkan dalam suatu daerah. Melalui produk komoditas unggulan perkebunan daerah tersebut dapat menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya serta memiliki daya saing yang tinggi. Jumlah komoditi perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat sebanyak 15 (limabelas) komoditi. tanpa mengesampingkan komoditi perkebunan lainnya, sesuai arahan

RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021 -2026 fokus utama pembangunan sub sektor perkebunan di Kabupaten Poso diarahkan pada 3 komoditi utama yang terdiri dari 3 (tiga) komoditi perkebunan daerah (spesifik lokasi) yaitu kopi robusta, kopi arabika dan 1 (satu) komoditi kawasan pertanian nasional yaitu kakao.

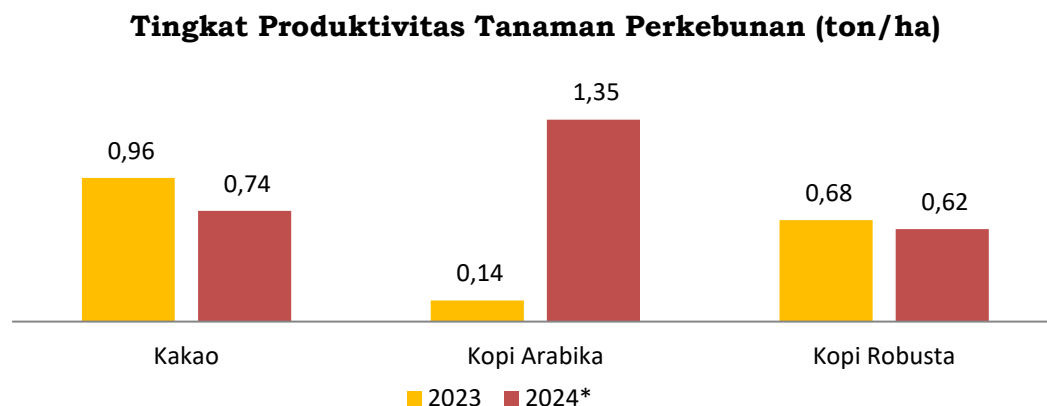
Gambaran produksi tanaman perkebunan Kabupaten Poso disajikan pada gambar 9



* Angka Sementara

Gambar 9. Pencapaian Produksi Tanaman Perkebunan 2 Tahun terakhir

Gambaran produktivitas tanaman perkebunan disajikan pada gambar 10



Gambar 10. Pencapaian Tingkat Produktivitas Tanaman Perkebunan 2 tahun terakhir

Tabel 8. Target dan Realisasi Kinerja Produktivitas Tanaman Perkebunan

	Indikator Kinerja	Produktivitas	% Capaian
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	Kakao	Target 0,92	80,49 % Berhasil
		Realisasi 0,74	
	Kopi Arabika	Target 2,12	63,77 % Cukup Berhasil
Realisasi 1,35			
	Kopi Robusta	Target 0,87	70,97 % Cukup Berhasil
		Realisasi 0,62	

Capaian Kinerja pada peningkatan produktivitas tanaman perkebunan komoditi kakao sebesar 80,49% di nilai berhasil dengan produktivitas sebesar 0,74 ton/ha dari yang ditargetkan 0,92 ton/ha dengan produksi sebesar 20.038,35 ton, komoditi kopi arabika dengan produktivitas 1,35 ton/ha dengan target 2,12 ton/ha capaian tersebut dinilai cukup berhasil dengan persentase capaian 63,77% dengan produksi sebesar 38,08 ton, komoditi kopi robusta dengan capaian sebesar 70,97% di nilai cukup berhasil dengan produktivitas sebesar 0,62 ton/ha dengan target 0,87 ton/ha dengan produksi sebesar 653,88 ton.

Tingkat keberhasilan ini adanya dukungan dari beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana terutama pupuk, obat-obatan, serta adanya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso dalam upaya memperbaiki tingkat produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan SLPHT tanaman perkebunan, pendampingan terhadap petani, penyediaan bibit unggul untuk kegiatan optimasi lahan, pelatihan petani untuk pembuatan pupuk organik, disamping itu juga dalam upaya memperbaiki mutu hasil tanaman perkebunan terutama komoditi kakao, Dinas Pertanian Kabupaten Poso menjalin kerjasama

dengan pihak terkait seperti Rainforest Alliance dan Swisscontact Indonesia untuk kegiatan sertifikasi biji kakao rakyat.

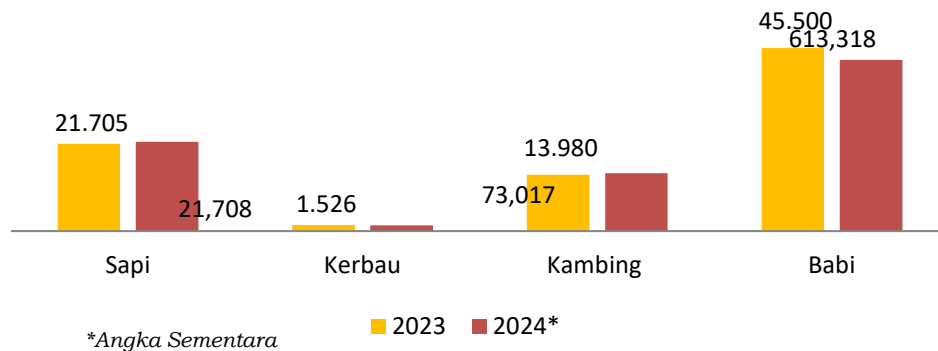
Sasaran Strategis 3 (SS3) MENINGKATNYA PRODUKSI/POPULASI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN

Produksi/Populasi Ternak di Kabupaten Poso Tahun 2024

Kenaikan produksi/populasi ternak Sapi, Kerbau dan Babi Tahun 2024 menunjukkan kenaikan yang dikategorikan cukup baik dan sangat baik walaupun adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi dan pada ternak babi African Swine Fever (ASF) yang mengalami angka kematian cukup tinggi. Namun oleh Kementerian Pertanian memberikan bantuan obat-obatan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso yang secara nyata mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut antara lain : (1). Dengan memberikan penyuluhan kepada peternak bagaimana cara pencegahan penyakit ternak tersebut; (2). Para petugas dibidang peternakan dan Kesehatan hewan untuk melakukan vaksinasi terhadap ternak yang dipelihara oleh Masyarakat; dan (3) Memperhatikan untuk tempat ternak dipelihara dalam keadaan yang bersih.

Gambaran populasi ternak di Kabupaten Poso disajikan pada gambar 11 berikut :

Perkembangan Populasi Ternak (ekor)



Gambar 11. Pencapaian Populasi Ternak di Kabupaten Poso 2 tahun terakhir

Beberapa permasalahan yang dihadapi sektor peternakan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut (1) Pemotongan sapi betina produktif, (2) Skala kepemilikan peternak yang kecil (3) Kurangnya jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb dan ATR) dan (4) Kurangnya sarana dan prasarana.

Penanganan Penyakit Hewan/Ternak

Kegiatan penanganan hewan/ternak di Kabupaten Poso tahun 2023 mencakup kegiatan seperti:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 2) Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan
- 3) Penyediaan Vaksin dan Bahan Biologik
- 4) Penanganan Gangguan Reproduksi

Pada tahun 2024 bidang kesehatan hewan melalui kegiatan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sub kegiatan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular. Capaian kinerja jumlah pengendalian penyakit ternak dari target capaian yang telah ditetapkan sebesar 125

kasus yang dapat dicapai sebesar 1150 kasus dengan pencapaian kinerja sebesar 920 kasus yang dikategorikan sangat berhasil.

Capaian target dan realisasi kinerja indikator meningkatnya populasi dan produktivitas peternakan disajikan pada tabel 9 dan 10 berikut :

Tabel 9. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Populasi Peternakan

Indikator Kinerja	Populasi		% Capaian
		Target	
Sapi	23.000		87,41 % Berhasil
	Realisasi 20.105		
Kerbau	Target 2.035		74,99 % Cukup Berhasil
	Realisasi 1.526		
Kambing	Target 13.000		92,15 % Berhasil
	Realisasi 11.980		
Babi	Target 65.000		70,00 % Cukup Berhasil
	Realisasi 45.500		

Angka Sementara

Capaian kinerja peningkatan populasi ternak Sapi pada tahun 2024 sejumlah 20.105 ekor kurang dari target yang ditetapkan sejumlah 23.000 ekor dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,41 %, walaupun capaian target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai namun capaian kinerja dianggap berhasil. Capaian kinerja peningkatan populasi ternak kerbau pada tahun 2024 sejumlah 1,526 ekor sedikit kurang dari target yang ditetapkan sejumlah 2.035 ekor dengan persentase capaian kinerja sebesar 74,99 %. Walaupun capaian target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai namun capaian kinerja dianggap cukup berhasil. Capaian kinerja populasi ternak kambing tahun 2024 sejumlah 11.980 ekor dengan target yang ditetapkan sejumlah 13.000 ekor dengan persentase capaian kinerja sebesar

92,15% yang kategori berhasil. Capaian kinerja populasi ternak babi tahun 2024 sejumlah 45.500 ekor kurang dari target yang ditetapkan sejumlah 65.000 ekor dengan persentase capaian kinerja sebesar 70,00% yang kategori cukup berhasil.

Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas Peternakan

	Indikator Kinerja	Produktivitas	% Capaian
	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya populasi/produksi dan produktivitas Peternakan	Sapi	Target 0,100 Realisasi 0,104
Kerbau		Target 0,130 Realisasi 0,120	92,31 % Berhasil
Kambing		Target 0,040 Realisasi 0,013	32,50 % Kurang Berhasil
Babi		Target 0,060 Realisasi 0,059	98,33 % Berhasil

Angka Sementara

Capaian kinerja peningkatan produktivitas ternak Sapi pada tahun 2024 sebesar 0,104 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,100 dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,00 %, capaian target kinerja dianggap sangat berhasil.

Capaian kinerja peningkatan produktivitas ternak Kerbau pada tahun 2024 sebesar 0,120 lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 0,130, walaupun capaian target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai namun capaian kinerja dianggap berhasil dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,31 %.

Capaian kinerja peningkatan produktivitas ternak Kambing pada tahun 2024 sebesar 0,013 lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar

0,040, capaian kinerja dianggap kurang berhasil dengan persentase capaian kinerja sebesar 32,50 %.

Capaian kinerja peningkatan produktivitas ternak Babi pada tahun 2024 sebesar 0,059 dengan target yang ditetapkan sebesar 0,060 dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,33%, capaian target kinerja dianggap berhasil.

Sasaran Strategis 4 (SS4)
MENINGKATNYA PENGELOLAAN LAHAN AIR DAN
ALSINTAN

Capaian target dan realisasi kinerja indikator meningkatnya Pengelolaan Lahan Air dan Alsintan disajikan pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Lahan Air dan Alsintan

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengelolaan Lahan Air dan Alsintan	Indikator Kinerja	Persentase	% Capaian
		Persentase Tingkat Penerapan Teknologi	Target 46 Realisasi 118

Capaian kinerja persentase tingkat penerapan teknologi tahun 2024 dari target yang sebesar 46 dapat dicapai sebesar 118 dengan persentase 256,52% yang dikategorikan sangat berhasil.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 dalam upaya mendukung penerapan teknologi melalui kegiatan Pengelolaan Lahan Air seperti kegiatan pembangunan jaringan irigasi primer yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan Handtraktor yang dibiayai oleh APBD II yang disertai dengan peningkatan keterampilan berupa pelatihan – pelatihan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan seperti magang dan bimtek tentang alsintan.

Sasaran Strategis 5 (SS5)
FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PETANI DAN
KELOMPOK

Capaian target dan realisasi kinerja indikator Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani pada tabel 12 berikut :

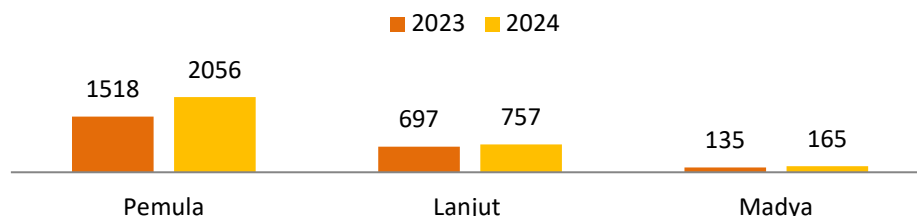
Tabel 12. Target dan Realisasi Kinerja Kenaikan Kelas Kelompok Tani

	Indikator Kinerja	Kelompok Tani	% Capaian
Sasaran Strategis 5 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelompok	Pemula	Target 2.056	100,00 %
		Realisasi 2.056	Sangat Berhasil
	Lanjut	Target 1.171	64,65 %
		Realisasi 757	Cukup Berhasil
	Madya	Target 102	161,76 %
		Realisasi 165	Sangat Berhasil

Capaian indikator kinerja kenaikan kelas kemampuan petani kategori pemula tahun 2024 sejumlah 2.056 kelompok tani dari target sejumlah 2.056 kelompok tani dengan persentase capaian sebesar 100% yang dikategorikan sangat berhasil. Kenaikan kelas kemampuan kelompok tani kategori lanjut pada tahun 2024 sejumlah 757 kelompok tani dari target sejumlah 1.171 kelompok tani dengan persentase capaian sebesar 64,65% yang dikategorikan sangat cukup berhasil. Kenaikan kemampuan kelompok tani kategori madya pada tahun 2024 sejumlah 165 kelompok tani dari target sejumlah 102 kelompok tani dengan persentase capaian sebesar 161,76% yang dikategorikan sangat berhasil.

Kenaikan kelas kemampuan kelompok tani 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 12 berikut :

Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani 2 Tahun Terakhir



Gambar 12. Kenaikan Kelas Kelompok Tani 2 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis 6 (SS6) PENINGKATAN EFISIENSI, KUALITAS DAN MUTU PRODUK PERTANIAN

Capaian target dan realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

Tabel 13. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Poso

	Indikator Kinerja	Persentase	% Capaian
Sasaran Strategis 6		Target 5,66	
Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Mutu Produk Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	Realisasi 8,40	148,41 % Sangat Berhasil

Capaian indikator kinerja kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Poso tahun 2024 sebesar 8,40% dari target sebesar 5.66% dengan persentase capaian sebesar 148,41 % yang dikategorikan sangat berhasil.

Tabel 14. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP)

	Indikator Kinerja	NTP	% Capaian
Sasaran Strategis 6 Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Mutu Produk Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	Target 100,01 Realisasi 96,43	96,42% Berhasil
	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Hortikultura	Target 104,64 Realisasi 130,49	124,70% Sangat Berhasil
	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Perkebunan	Target 95,23 Realisasi 134,76	141,51% Sangat Berhasil
	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Target 108,26 Realisasi 103,88	95,95 Berhasil

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Dinas Pertanian Kabupaten Poso tidak melakukan perhitungan NTP, tetapi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Poso memperoleh alokasi pagu APBD senilai Rp. 68.619.504.069,- yang dipergunakan untuk membiayai 7 program, 20 kegiatan dan 49 sub kegiatan, realisasi serapan APBD Dinas Pertanian Kabupaten Poso senilai Rp. 65.577.816.471,- (95,57%) yang terdiri dari Belanja Operasi mencapai Rp 64.226.793.014,- dan Belanja Modal Rp. 1.351.023.457,-.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2024 sebesar Rp. 140.300.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.156.522.500,- atau sebesar (111,56%), yang terbagi atas dua, yaitu Jasa Umum dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.23.507.000,- atau sebesar 118,72% dan retribusi jasa usaha dengan realisasi Rp.133.015.500,- atau sebesar 110,39%.

Efisiensi Anggaran Tahun 2024				
Jenis Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Serapan (%)
Belanja Operasional	67.259.063.319,00	64.226.793.014,00	3.032.270.305,00	95,49
Belanja Modal	1.360.440.750,00	1.351.023.457,00	9.417.293,00	99,31
Total	68.619.504.069,00	65.577.816.471,00	3.041.687.598,00	95,57

Analisis:
Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.041.687.598.- yang belum terserap sepenuhnya. Realisasi belanja mencapai 95,57%, menunjukkan efisiensi dalam pengadaan sarana pertanian. Ke depan, dana yang tersisa akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur irigasi di Kecamatan 'Lumbung Padi' Kabupaten Poso

Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	67.259.063.319	64.226.793.014	95,49	1.360.440.750	1.351.023.457	99,31
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	67.259.063.319	64.226.793.014	95,49	1.360.440.750	1.351.023.457	99,31
	Dinas Pertanian Kab. Poso	67.259.063.319	64.226.793.014	95,49	1.360.440.750	1.351.023.457	99,31
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.259.650.273	21.678.796.802	97,39	67.517.500	67.410.000	99,84
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.451.000	296.191.592	93,30	43.397.500	43.300.000	99,78
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.552.800	24.772.100	56,88	39.997.500	39.900.000	99,76
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.549.700	9.487.600	99,35	0	0,00	-
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.199.800	1.944.100	88,38	0	0,00	-
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.199.800	2.163.500	98,35	0	0,00	-
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.999.800	2.874.800	95,83	0	0,00	-
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.880.400	176.167.392	99,04	3.400.000	3.400.000	100,00
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.068.700	78.782.100	99,64	0	0,00	-
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.777.481.114	19.325.545.481	97,71	0	0,00	-
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.767.818.414	19.315.920.481	97,71	0	0,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.275.000	1.275.000	100,00	0	0,00	-
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.275.000	1.275.000	100,00	0	0,00	-
3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.275.000	1.275.000	100,00	0	0,00	-
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.825.900	3.800.000	99,32	0	0,00	-
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.011.800	2.000.000	99,41	0	0,00	-
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	100,00	0	0,00	-
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.450.000	3.450.000	100,00	0	0,00	-
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.315.110	516.794.391	99,32	0	0,00	-
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.990.580	17.900.000	99,50	0	0,00	-
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.567.800	39.457.000	99,72	0	0,00	-
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.269.580	8.133.500	98,35	0	0,00	-
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.499.800	2.375.000	95,01	0	0,00	-
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	1.490.000	99,33	0	0,00	-
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.487.350	447.438.891	99,32	0	0,00	-
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.850.000	2.690.000	94,39	24.120.000	24.110.000	99,96
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.850.000	2.690.000	94,39	24.120.000	24.110.000	99,96
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.830.630	1.262.803.442	95,82	0	0,00	-
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.499.640	1.476.320	98,44	0	0,00	-
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.167.279	131.029.302	73,13	0	0,00	-
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.411.900	14.552.500	94,42	0	0,00	-
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.121.751.811	1.115.745.320	99,46	0	0,00	-
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.272.419	271.321.896	84,72	0	0,00	-
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.271.570	171.982.212	78,08	0	0,00	-
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.849	99.339.684	99,34	0	0,00	-
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.587.803.719	10.803.430.785	85,82	715.631.250	712.522.250	99,57
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.189.550.290	6.421.526.646	78,41	701.073.000	698.000.000	99,56

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.875.686.590	3.785.618.550	97,68	701.073.000	698.000.000	99,56
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.313.863.700	2.635.908.096	61,10	0	0,00	-
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.338.874.275	3.329.369.004	99,72	3.636.000	3.600.000	99,01
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.338.874.275	3.329.369.004	99,72	3.636.000	3.600.000	99,01
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.027.060	135.195.335	97,24	4.424.750	4.424.750	100,00
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	139.027.060	135.195.335	97,24	4.424.750	4.424.750	100,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	920.352.094	917.339.800	99,67	6.497.500	6.497.500	100,00
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	920.352.094	917.339.800	99,67	6.497.500	6.497.500	100,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	26.101.258.046	25.732.323.693	98,59	354.792.000	354.591.207	99,94
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	25.976.858.346	25.620.572.693	98,63	349.192.000	348.991.207	99,94
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	25.976.850.546	25.620.572.693	98,63	304.200.000	304.200.000	100,00
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	7.800	0,00	-	44.992.000	44.791.207	99,55
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	124.399.700	111.751.000	89,83	5.600.000	5.600.000	100,00
3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	124.399.700	111.751.000	89,83	5.600.000	5.600.000	100,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.048.507.646	1.021.733.900	97,45	7.000.000	7.000.000	100,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	738.877.810	718.955.900	97,30	0	0,00	-
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	738.877.810	718.955.900	97,30	0	0,00	-
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	72.333.928	71.955.000	99,48	0	0,00	-
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	72.333.928	71.955.000	99,48	0	0,00	-
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	237.295.908	230.823.000	97,27	7.000.000	7.000.000	100,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	163.295.908	160.180.000	98,09	7.000.000	7.000.000	100,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	74.000.000	70.643.000	95,46	0	0,00	-
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.633.466.135	1.631.136.700	99,86	0	0,00	-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.633.466.135	1.631.136.700	99,86	0	0,00	-
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.557.939.435	1.555.788.700	99,86	0	0,00	-
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75.526.700	75.348.000	99,76	0	0,00	-
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	335.959.662	326.719.040	97,25	15.500.000	15.000.000	96,77
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.756.242	279.792.040	97,91	15.500.000	15.000.000	96,77
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	51.244.540	46.884.640	91,49	0	0,00	-
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	234.511.702	232.907.400	99,32	15.500.000	15.000.000	96,77
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	50.203.420	46.927.000	93,47	0	0,00	-
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	50.203.420	46.927.000	93,47	0	0,00	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.292.417.838	3.032.652.094	92,11	200.000.000	194.500.000	97,25
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.292.417.838	3.032.652.094	92,11	200.000.000	194.500.000	97,25
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	775.187.500	762.922.500	98,42	0	0,00	-
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	26.000.000	26.000.000	100,00	0	0,00	-
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	88.203.758	88.203.758	100,00	200.000.000	194.500.000	97,25
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.283.231.580	2.036.039.836	89,17	0	0,00	-
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	119.795.000	119.486.000	99,74	0	0,00	-

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Poso. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso kepada masyarakat (publik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 2 (Dua) sasaran strategis dengan 16 (Enam Belas) indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil. Dari hasil evaluasi hanya 6 indikator kinerja yang sangat berhasil, 4 indikator kinerja berhasil, 2 Indikator kinerja cukup berhasil dan 4 indikator kinerja kurang berhasil.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2024 khususnya perkembangan capaian 16 (Enam Belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Poso baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan baik itu yang dibiayai oleh APBD II, APBD Propinsi dan APBN Pusat yang secara khusus mempengaruhi capaian 9 indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak

langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Poso.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Dinas, Kinerja Pembangunan Pertanian 2024 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

HAMBATAN / KENDALA

1. Koordinasi dan Komunikasi yang Belum Optimal

Hambatan muncul karena kurangnya sinkronisasi antara penyuluh, aparat pemerintah, dan kelompok tani. Hal ini mengakibatkan informasi tentang program dan inovasi pertanian tidak tersampaikan secara merata kepada para petani.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Masalah infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan fasilitas pendukung pertanian yang masih kurang memadai sering menghambat akses dan distribusi input pertanian serta hasil panen.

3. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang terbatas dan jumlah tenaga penyuluh yang tidak mencukupi berdampak pada pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan yang intensif.

4. **Rendahnya Adopsi Teknologi Modern**

Banyak petani yang masih bergantung pada metode tradisional sehingga sulit untuk mengadopsi teknologi pertanian modern yang berpotensi meningkatkan produktivitas.

5. **Sistem Pelaporan dan Monitoring yang Kurang Efektif**

Sistem pelaporan seperti Laporan Luas Tanam Harian (LTT) dan mekanisme evaluasi kinerja belum sepenuhnya optimal untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu kepada para petani.

REKOMENDASI / SOLUSI

1. **Peningkatan Koordinasi dan Pertemuan Rutin**

Pemerintah daerah telah menginisiasi pertemuan koordinasi, seperti pertemuan penyuluh pertanian se-Kabupaten Poso yang bertujuan untuk saling bertukar informasi, memecahkan masalah, dan menyusun strategi bersama.

2. **Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Upaya perbaikan infrastruktur melalui program pembangunan irigasi, perbaikan jalan, dan pembangunan fasilitas penyimpanan hasil pertanian guna mendukung distribusi dan pemasaran produk.

3. **Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Teknis**

Pelatihan dan bimbingan bagi petani untuk mengadopsi teknologi pertanian modern, serta pendampingan oleh penyuluh agar petani dapat mengoptimalkan penggunaan pupuk bersubsidi dan alat-alat pertanian.

4. **Optimalisasi Sistem Informasi dan Monitoring**

Penerapan sistem pelaporan harian dan monitoring yang terintegrasi agar data produksi dan kebutuhan petani dapat segera

diketahui serta dilakukan evaluasi dan perbaikan program secara berkala.

5. **Kolaborasi Multi-Pihak**

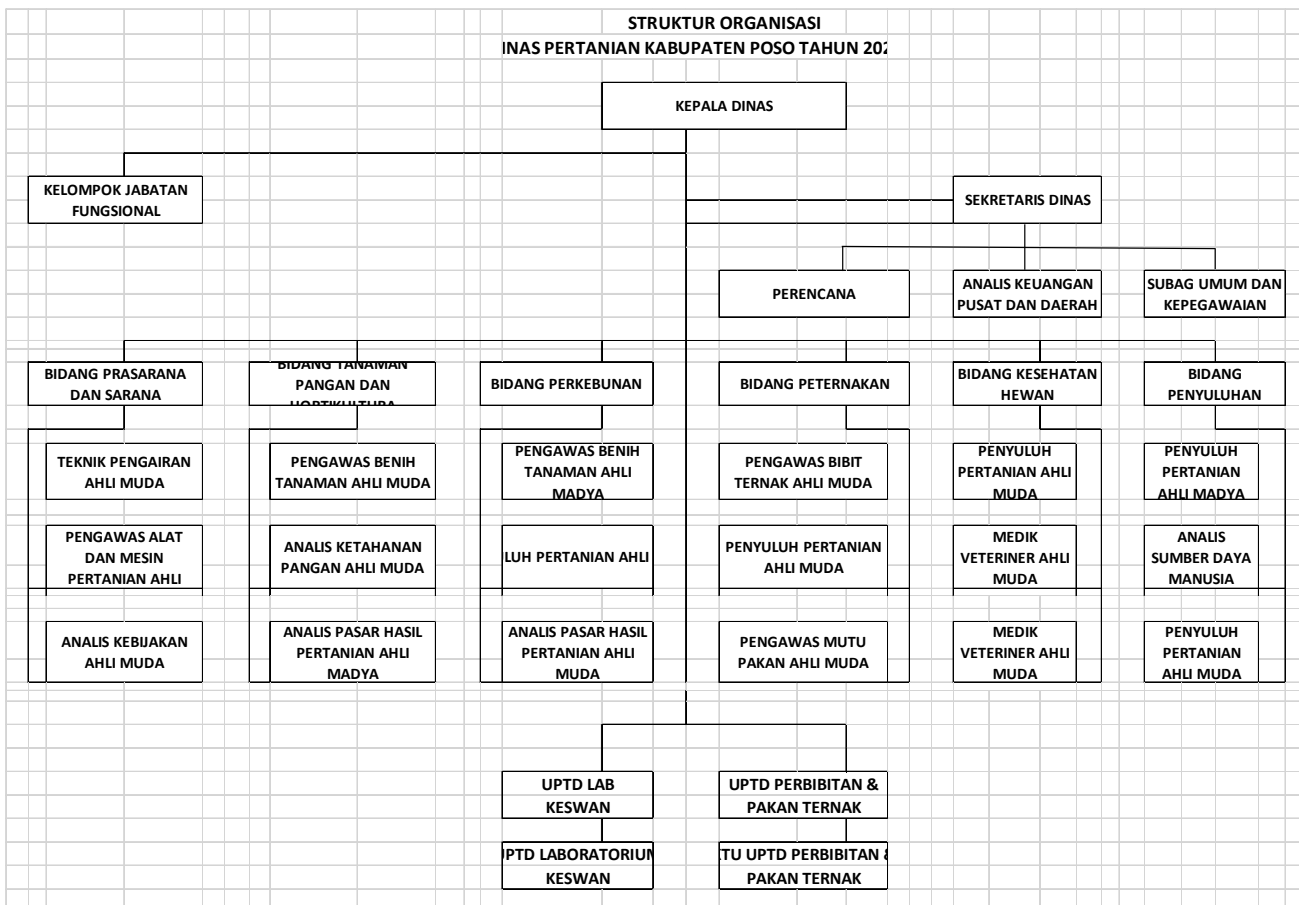
Melibatkan stakeholder seperti pemerintah desa, kelompok tani, akademisi, dan pihak swasta untuk menciptakan sinergi dan solusi yang lebih holistik, terutama dalam hal inovasi pertanian dan pengelolaan sumber daya.

KESIMPULAN

1. Produktivitas pertanian mengalami sedikit penurunan pada beberapa komoditas utama akibat factor perubahan dalam curah hujan dan kondisi ekstrem seperti El-Nino dan La-Nina yang secara langsung mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi padi. Sementara itu, dari kerusakan infrastruktur irigasi dan dampak bencana alam menunjukkan bahwa sistem distribusi air yang rusak dapat memperburuk kondisi produksi, menurunkan hasil panen padi, dan bahkan mengancam ketahanan pangan lokal kerusakan infrastruktur irigasi.
2. Realisasi anggaran mencapai 95,57%, namun terdapat potensi peningkatan efisiensi dalam belanja modal yang tidak terserap sebagai realisasi anggaran dan Dinas Pertanian Kabupaten Poso akan mengalokasikan kembali sisa anggaran untuk perbaikan irigasi dan peningkatan kapasitas petani.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Poso



**Lampiran 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang TPH
Bantuan Benih Padi**



**Lampiran 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang PSP
Bantuan Alsintan**



**Lampiran 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang PSP
Bantuan Jalan Tani**



**Lampiran 5. Kegiatan Bidang TPH Penyerahan Bantuan Pupuk
Hayati Cair (PHC)**



Lampiran 6. Kegiatan Vaksinasi Bidang Kesehatan Hewan





*Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian
Yang Dibiayai Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2024*



*Identifikasi Penyakit Rabies Yang Dilakukan Oleh Petugas
Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Poso*



Bantuan Ternak Sapi Dalam Upaya Meningkatkan Populasi Ternak
Dikabupaten Poso



Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani yang Dilakukan Oleh Penyuluh dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani